

EVALUASI TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INVESTASI DI INDONESIA DAN IMPLIKASI KEBIJAKANNYA

Nugroho SBM *)

Abstrak

Investasi merupakan salah satu variabel yang penting dalam sebuah perekonomian. Ada beberapa hal yang memengaruhi investasi, yaitu suku bunga, PDRB, utilitas, birokrasi, kualitas SDM, regulasi, stabilitas politik dan keamanan serta faktor sosial budaya. Hal ini menimbulkan implikasi kebijakan, yaitu penurunan suku bunga, kebijakan fiskal, perbaikan sarana dan prasarana, perbaikan birokrasi pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelonggaran regulasi, kebijakan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan, penguatan budaya lokal.

Kata Kunci : *Investasi, implikasi*

Pendahuluan

Investasi atau penanaman modal merupakan salah satu variabel yang penting dalam sebuah perekonomian. Pertama, investasi mendorong pertumbuhan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi) secara berlipat ganda lewat proses *multiplier*. Maksudnya jika ada investasi Rp. 100 triliun – misalnya- maka pertumbuhan pendapatan nasional akan lebih besar dari Rp. 100 triliun.

Kedua, investasi juga akan mendorong penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja ini akan mengurangi pengangguran. Berkurangnya pengangguran akan mengurangi kemiskinan. Dan berkurangnya kemiskinan akan berdampak pada teratasinya masalah-masalah ikutan lain seperti gizi buruk, buta huruf, kejahatan dan lain-lain.

Ketiga, investasi juga bisa dipakai sebagai alat untuk pemerataan baik pemerataan antar daerah, antar sektor dan antar perorangan. Investasi sebagai alat pemerataan ini tentu saja tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri atau dibiarkan berjalan menurut mekanisme pasar tetapi harus ada intervensi pemerintah. Misalnya saja pemerintah bertujuan untuk memperkecil ketimpangan ekonomi antar dua daerah (daerah yang satu maju dan yang satu tertinggal). Maka ketimpangan itu bisa diatasi salah satunya dengan mengarahkan investasi ke daerah yang tertinggal. Caranya ada macam-macam, misalnya memberi insentif pembebasan pajak bagi investor yang bersedia berinvestasi di daerah yang tertinggal, mempermudah ijin investasi di daerah tertinggal agar investor tertarik menanamkan modalnya di sana, dan banyak kebijakan lain.

Indonesia pada skala nasional dan juga propinsi serta kabupaten dan kota di Indonesia pada skala regional masih membutuhkan investasi yang besar

karena masih menghadapi berbagai masalah perekonomian, seperti pengangguran, kemiskinan dan lain-lain yang salah satunya dipecahkan dengan investasi.

Jika kabupaten dan kota serta propinsi-propinsi di Indonesia maupun Indonesia sendiri pada skala nasional ingin memperbesar investasi baik investasi domestik maupun asing maka perlu dikenali terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi investasi tersebut untuk kemudian mengevaluasi apakah faktor-faktor tersebut kondisinya cukup mendorong terjadinya investasi.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Investasi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi investasi. Pertama, suku bunga. Suku bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam menarik investasi karena sebagian besar investasi biasanya dibiayai dari pinjaman bank. Jika suku bunga pinjaman turun maka akan mendorong investor untuk meminjam modal dan dengan pinjaman modal tersebut maka ia akan melakukan investasi.

Faktor kedua, pendapatan nasional per kapita untuk tingkat negara (nasional) dan PDRB per kapita untuk tingkat propinsi dan Kabupaten atau Kota. Pendapatan nasional per kapita dan PDRB per kapita merupakan cermin dari daya beli masyarakat atau pasar. Makin tinggi daya beli masyarakat suatu negara atau daerah (yang dicerminkan oleh pendapatan nasional per kapita atau PDRB per kapita) maka akan makin menarik negara atau daerah tersebut untuk berinvestasi.

Ketiga, kondisi sarana dan prasarana. Investasi membutuhkan sarana dan prasarana pendukung. Prasarana dan sarana pendukung tersebut meliputi sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, utilitas, pembuangan limbah dan lain-lain. Sarana

*) Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang

dan prasarana transportasi contohnya antara lain : jalan, terminal, pelabuhan, bandar udara dan lain-lain. Sarana dan prasarana telekomunikasi contohnya: jaringan telepon kabel maupun nirkabel, jaringan internet, prasarana dan sarana pos. Sedangkan contoh dari utilitas adalah tersedianya air bersih, listrik dan lain-lain.

Keempat, birokrasi perijinan. Birokrasi perijinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi investasi karena birokrasi yang panjang memperbesar biaya bagi investor. Birokrasi yang panjang akan memperbesar biaya bagi pengusaha karena akan memperpanjang waktu berurusan dengan aparat. Padahal bagi pengusaha, waktu adalah uang. Kemungkinan yang lain, birokrasi yang panjang membuka peluang oknum aparat pemerintah untuk menarik suap dari para pengusaha dalam rangka memperpendek birokrasi tersebut.

Kelima, kualitas sumberdaya manusia. Manusia yang berkualitas akhir-akhir ini merupakan daya tarik investasi yang cukup penting. Sebabny adalah teknologi yang dipakai oleh para pengusaha makin lama makin modern. Teknologi modern tersebut menuntut ketrampilan lebih dari tenaga kerja.

Keenam, peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan. Peraturan undang-undang ketenagakerjaan ini antara lain menyangkut peraturan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK), Upah Minimum, kontrak kerja dan lain-lain. Ketujuh, stabilitas politik dan keamanan. Stabilitas politik dan keamanan penting bagi investor karena akan menjamin kelangsungan investasinya untuk jangka panjang.

Kedelapan, faktor-faktor sosial budaya. Contoh faktor sosial budaya ini misalnya selera masyarakat terhadap makanan. Orang Jawa pedalaman misalnya lebih senang masakan yang manis rasanya, sementara masyarakat Jawa pesisiran lebih senang masakan yang asin rasanya.

Evaluasi Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi

Bagaimanakah kondisi dari faktor-faktor yang mempengaruhi investasi tersebut baik pada skala nasional maupun regional di Indonesia? Pertama, faktor suku bunga. Suku bunga SBI sebagai *benchmark* suku bunga sebenarnya sudah cukup rendah yaitu saat ini 8 persen. Tetapi baik suku bunga simpanan dan terutama suku bunga pinjaman sampai saat ini masih tinggi. Masih tingginya suku bunga pinjaman saat ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain inefisiensi perbankan dimana biaya *overhead* perbankan yang masih tinggi, masih tingginya resiko dalam pemberian kredit/pinjaman dan lain-lain.

Faktor kedua, pendapatan per kapita juga masih rendah. Pendapatan nasional per kapita Indonesia saat ini sekitar 1.300 dolar AS atau sekitar Rp. 13.000.000,- per orang per tahun. Sementara untuk propinsi dan kabupaten/kota saat ini juga rata-rata masih belum pulih dari krisis kecuali untuk kota-kota besar.

Faktor ketiga, tentang sarana dan prasarana serta utilitas harus diakui baik yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun propinsi atau Kabupaten/Kota kondisinya masih buruk. Banyak jalan yang berlubang karena kualitas yang jelek. Pasokan listrik yang terbatas. Hal tersebut merupakan contoh masih buruknya kondisi sarana dan prasarana serta utilitas.

Faktor keempat, birokrasi dan perijinan juga belum memuaskan. Tentang birokrasi perijinan ini bisa kita simak dari laporan hasil penelitian yang dikeluarkan International Finance Corporation (IFC) dan Bank Dunia serta Bank Pembangunan Asia yang tertuang dalam laporan IFC dan Bank Dunia mengenai "Doing Business 2007" Indonesia menduduki peringkat 135 dari 175 negara dalam hal kemudahan memulai usaha baru. Peringkat ini turun dari posisi 131 tahun lalu karena perbaikan tak signifikan negara lain. Kemudahan untuk memulai usaha baru merosot sehingga investasi tidak meningkat secara signifikan. Sementara kinerja pertumbuhan ekspornya juga turun dibandingkan negara-negara kawasan ASEAN. Penurunan peringkat tersebut bukan berarti negatif bagi Indonesia, tetapi perbaikan yang terjadi di negara-negara lain sangat signifikan, sementara Indonesia tidak.

Sementara itu, negara tetangga terdekat kita, Singapura, menempati posisi pertama negara yang paling mudah untuk memulai usaha. Negara tersebut berhasil menyingkirkan posisi Selandia Baru ke peringkat kedua yang tahun lalu menduduki posisi teratas. Indonesia telah mengalami reformasi dalam hal kemudahan memulai usaha. Waktu yang diperlukan tadinya sangat panjang, yakni 151 hari. Namun telah dipangkas menjadi 97 hari saat ini.

Indonesia juga akan menerapkan pengarsipan secara elektronik untuk perpajakan. Untuk indikator kemudahan memulai usaha lainnya, Indonesia tidak mengalami perbaikan. Dalam hal mengurus izin, masih harus ditempuh 19 prosedur yang membutuhkan 224 hari. Perpajakan misalnya, ada 52 jenis pajak dengan waktu yang dibutuhkan 576 jam. Kinerja pertumbuhan ekspor Indonesia pun telah mengalami penurunan yang cukup besar, yang secara tradisional sudah menjadi keunggulan komparatif Indonesia seperti mebel, kelapa sawit, karet, tekstil dan alas kaki.

Faktor birokrasi dan perijinan ini bertambah buruk dengan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam

pelaksanaan otonomi daerah tersebut banyak daerah yang untuk kepentingan mencari PAD (Pendapatan Asli Daerah) telah menciptakan peraturan daerah (Perda) yang intinya memungut pajak dan retribusi daerah serta memperumit ijin investasi.

Namun demikian di tengah masih buruknya birokrasi perijinan ini, ada kabar baik dengan diterapkannya Kantor Pelayanan Satu Atap atau "One Stop Service" (OSS) di berbagai daerah untuk melayani investasi. Hanya masalahnya sampai saat ini interpretasi dari apa yang disebut sebagai OSS tersebut masih beragam di berbagai daerah. Ada yang sekedar semacam humas, ada yang memang satu atap tetapi meja yang dilalui masih cukup banyak. Tetapi ada daerah yang memang telah menerapkan OSS secara benar yaitu memang ijin investasi hanya lewat kantor OSS.

Kelima, faktor kualitas sumberdaya manusia. Hal yang menarik dari kualitas sumberdaya manusia ini adalah sebenarnya tingkat pendidikan angkatan kerja Indonesia makin membaik tetapi ternyata tidak terserap oleh lapangan kerja. Hal ini dapat dilihat dari makin meningkatnya tingkat pendidikan dari para penganggur terbuka (yaitu mereka yang sama sekali tidak bekerja) di Indonesia. Penganggur terbuka Indonesia berdasar data terbaru SUSENAS 2005 berdasarkan tingkat pendidikan dari yang paling besar adalah berpendidikan SLTA sekitar 36 persen, mengalahkan mereka yang berpendidikan SD sebesar 32 persen. Tidak terserapnya angkatan kerja ini mengindikasikan "mismatch" antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Keenam, UU dan peraturan ketenagakerjaan. Ada anggapan dari kalangan dunia usaha bahwa UU dan peraturan ketenagakerjaan ini terlalu membela tenaga kerja. Misalnya saja ada peraturan yang membuat PHK sangat sulit dilakukan. Demikian juga dalam hal kebijakan upah minimum ternyata telah banyak memberatkan dunia usaha (meskipun ada juga perusahaan yang sebenarnya mampu tetapi pura-pura tidak mampu membayar upah sesuai ketentuan upah minimum). Akibat dari kondisi demikian maka tampaknya hal ini menjadi bumerang bagi tenaga kerja sendiri. Akibatnya elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan kesempatan kerja saat ini menurun. Kalau dulu 1 persen pertumbuhan ekonomi menciptakan kesempatan kerja baru bagi 400.000 orang, tetapi sekarang ini 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya menciptakan kesempatan kerja bagi 200.000 orang. Ini mengindikasikan pengusaha atau investor memilih teknologi yang lebih padat modal karena berurusan dengan tenaga kerja semakin rumit dan tidak menyenangkan.

Ketujuh, dalam hal stabilitas politik dan keamanan. Dalam hal kestabilan politik dan keamanan

tampaknya kondisi sekarang ini rata-rata pada skala nasional maupun daerah sudah lumayan. Hal ini terbukti, misalnya, pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah di berbagai daerah meskipun masih ada keributan di sana-sini tetapi tidak sampai membesar menjadi konflik dan kerusuhan yang cukup membahayakan stabilitas politik dan keamanan. Tampaknya masyarakat Indonesia sudah dewasa dalam berpolitik. Ini merupakan faktor yang penting dalam mendukung terealisasinya investasi.

Kedelapan, faktor sosial budaya. Dalam hal faktor sosial budaya tampaknya ada sebagian besar pengusaha Indonesia yang telah memanfaatkan dengan baik tetapi tampaknya banyak pengusaha-pengusaha asing yang justru lebih jeli. McDonald misalnya sekarang mulai membuat berbagai masakan maupun rasa masakan yang mengadopsi budaya lokal. Rasa *softdrink*nya misalnya dibuat manis. Padahal di Amerika Serikat tempat asal perusahaan tersebut rasa *softdrink*nya tidak manis. McDonald juga telah membuat berbagai masakan tradisional misalnya McRendang.

Implikasi Kebijakan

Ada beberapa implikasi kebijakan yang dapat ditarik atas evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi investasi di Indonesia. Pertama, perlunya bank-bank didorong untuk menurunkan suku bunga. Caranya BI bisa memakai jalur himbauan moral (*moral suasion*) kepada bank-bank umum untuk menurunkan suku bunga pinjaman atau kreditnya. Cara ini pernah dilakukan dan ternyata cukup ampuh karena bagi bank-bank umum, himbauan BI sama saja dengan "Perintah". Upaya ini bisa diikuti dengan upaya untuk mendorong bank-bank untuk memperkecil premi resiko kredit dengan cara mengkaitkan ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) dengan Rasio Kredit-Simpanan (*Loan to Deposit Ratio* atau LDR). Makin besar LDR akan makin kecil GWMnya. Dengan demikian bank-bank umum akan tertarik untuk memberikan kredit dengan cara menurunkan suku bunga kreditnya (lewat penurunan premi resiko kreditnya).

Tentang pendapatan nasional per kapita atau PDRB per kapita memang bukan variabel kebijakan yang eksogen karena banyak faktor-faktor mempengaruhinya. Namun demikian kebijakan subsidi dan bantuan langsung tunai untuk jangka yang sangat pendek dan sementara ini bisa meningkatkan pendapatan per kapita untuk sebagian masyarakat.

Ketiga, mengenai sarana-prasarana serta utilitas yang masih buruk kondisinya memang harus dipilah-pilah pemecahannya. Untuk krisis listrik akibat kenaikan BBM untuk bahan bakar pembangkit

tenaga listrik memang seharusnya PLN sudah mulai mencari alternatif untuk pembangkit listrik. Untuk sarana dan prasarana yang lain pembangunannya bisa bekerjasama dengan swasta lewat mekanisme PPP (*Public Private Partnership*). Tentu saja ada kompensasi yang diberikan kepada pihak swasta yang diajak kerjasama tersebut.

Keempat, dalam hal birokrasi perijinan pemerintah harus tetap berusaha memangkas birokrasi. Terhadap perda-perda yang tidak pro investasi, pemerintah pusat mestinya berani untuk mencabutnya. Pelaksanaan OSS mestinya juga didukung. Bentuk dukungan mungkin daerah yang melaksanakan secara benar akan diberikan hadiah (*award*) dan mungkin bantuan dana.

Kelima, mengenai sumberdaya manusia. Kebijakan yang harus diambil adalah bagaimana mengkaitkan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Oleh karena itu program magang di berbagai bidang usaha untuk para peserta didik yang sangat bermanfaat untuk menjembatani antar dunia pendidikan dengan dunia kerja perlu juga terus didorong oleh pemerintah.

Keenam, pelonggaran tentang beberapa peraturan dan UU yang menyangkut ketenagakerjaan supaya tidak terlalu berat sebelah membela buruh juga perlu dilakukan oleh pemerintah supaya para investor tertarik melakukan investasi.

Ketujuh, tentang stabilitas politik dan keamanan memang sudah baik. Yang perlu dilakukan adalah menjaganya jangan sampai hancur kembali.

Kedelapan, tentang budaya lokal yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan riset dan kemudian menyebarkannya bagi dunia usaha untuk meyakinkan bahwa memperhatikan budaya lokalpun bisa memperkuat pasar bagi produk yang dihasilkan oleh para investor.

Penutup

Demikianlah sedikit uraian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi investasi, bagaimana kondisi faktor-faktor tersebut di Indonesia, serta implikasi kebijakannya untuk memperbaiki iklim investasi. Mudah-mudahan tulisan ini bisa sedikit membantu memecahkan kebuntuan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia dalam menarik investasi akhir-akhir ini.

Daftar Pustaka

Nugroho SBM, 2003, *Menyibak Wajah Otonomi Daerah*, Penerbit MM dan Lembaga Studi Kebijakan Ekonomi (LSKE) Undip, Semarang

Sadono Sukirno, 1994, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

World Bank, 2007, *Cost of Doing Business in Indonesia*, tersedia di <http://worldbank.org>

Dumairy, 2007, *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Erlangga Jakarta